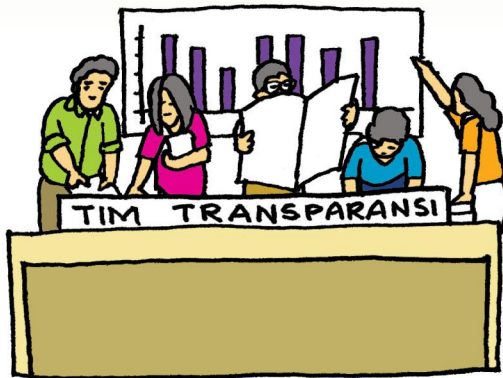


migas di Bojonegoro. Alhamdulillah, setelah bergabung dengan tim ini, semangat juang saya semakin menyala.

Tim ini dibentuk pada Juli 2010 atas inisiatif Bojonegoro Institute dan PATTIRO. Sejak itu, aktivitas koordinasi rutin berjalan. Saya sendiri lebih berkonsentrasi pada persoalan lingkungan di blok Sukowati. Supolo—anggota lain tim ini—bertugas di lokasi blok Cepu. Jatmiko, wartawan *Tempo*, berkonsentrasi di pengawalan media jurnalistik untuk isu migas. Perwakilan pemerintah kabupaten bertugas mengawal sisi komunikasi dengan pemerintahan pusat. Sementara itu, Yuris Krisnanto, koordinator Tim Transparansi, perwakilan PT Bangun Bangkit Sarana—Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bojonegoro, mengawal peran BUMD untuk bisa mendapat akses dan berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan migas besar yang masuk ke Bojonegoro. Bojonegoro Institute selain sebagai inisiator awal dan koordinator tim, secara khusus mengawal peraturan



daerah (perda) tentang Tata Kelola Industri Ekstraktif Migas. Perwakilan dari perusahaan, baik Petrochina maupun MCL juga terlibat di tim ini. Namun, mereka belum bisa menjadi representasi dari perusahaan untuk bergabung di tim karena mereka berpendapat bahwa kebijakan migas itu ada di pusat. Mereka berlingung di balik BP Migas dan Kementerian ESDM. Padahal, menurut Mustofirin, pegiat Bojonegoro Institute, sebenarnya peran perwakilan perusahaan di Tim Transparansi ini sangat diharapkan sebab dokumen-dokumen pokok ada di tangan mereka.

Menurut saya, hasil yang didapat Tim Transparansi ini belum maksimal. Salah satu sebab, masyarakat tidak bisa mengakses dokumen-dokumen karena kebijakan migas ditangani pemerintah pusat. Jangankan masyarakat, pemerintah daerah saja tidak memiliki dokumen migas, misalnya data tentang penerimaan dana bagi hasil (DBH) migas. Padahal, seharusnya semua dokumen yang terkait DBH harus dibuka ke publik.

Melalui Tim Transparansi ini, ketiga belah pihak—warga, pemerintah, dan perusahaan—memiliki satu ruang komunikasi untuk menyelesaikan segala hal terkait dengan investasi di daerah. Prinsipnya, perusahaan migas di daerah adalah milik warga. Semuanya harus menjaga prinsip dasar itu. Jika ketiga pihak tidak bersatu, potensi konflik akan muncul sehingga ruang investasi di daerah tidak dapat berjalan secara maksimal.

Dari Konfrontasi ke Kemitraan untuk Transparansi

Penuturan Imam Sutikno



PATTIRO

CENTRE FOR LAW AND DEMOCRACY